

Judul : Peduli Lindungi Dipadukan Ke Swasta
Tanggal : Selasa, 28 September 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

PeduliLindungi Dipadukan ke Swasta

DPR meminta kerja sama swasta tetap menjamin data pribadi warga.

■ DIAN FATH RISALAH,
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Rambahan aplikasi pelacakan vaksinasi dan kasus Covid-19 milik pemerintah, PeduliLindungi, kian luas dan menggurita. Terkini, sejumlah platform digital swasta Tanah Air akan diintegrasikan dengan fitur-fitur pada aplikasi tersebut.

Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemkes) Setiaji mengatakan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan platform-platform digital, seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Tiket.com, DANA, Livin' by Mandiri, Traveloka, Cinema XXI, LinkAja!, GOERS, dan JAKI.

Nantinya platform digital swasta akan dihubungkan dengan *application programming interface* (API) ke PeduliLindungi. Dengan integrasi itu, platform digital terkait bisa mengakses sistem informasi karantina, sistem pelacakan, informasi vaksinasi, dan fitur lainnya yang selama ini terhubung ke PeduliLindungi.

"Ini akan *launching* di bulan Oktober ini. Ada proses di mana kami memerlukan beberapa model untuk bisa diakses oleh setiap orang," kata

Setiaji saat dihubungi *Republika*. Senin (27/9).

Aplikasi PeduliLindungi yang merekam data dan pengguna tersebut dikenalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada April 2020 lalu. Kala itu, fungsinya khusus pada pasien Covid-19 untuk melacak pergerakan mereka dan memberi peringatan pada pemilik telepon genggam di sekitar pasien itu.

Pada pertengahan Agustus 2021, aplikasi tersebut jadi kewajiban bagi

pengunjung mal yang dibuka seturut melandainya penularan Covid-19. Pemeriksaan status vaksinasi pengguna jadi salah satu fitur baru aplikasi tersebut.

Setelah itu, pemerintah meluaskan penggunaan aplikasi tersebut untuk syarat perjalanan, masuk tempat wisata dan hotel, sampai memasuki lembaga pemerintahan.

Meski sudah beroperasi lebih setahun, menurut Setiaji, pihaknya masih dalam proses mendaftarkan aplikasi PeduliLindungi ke dalam penyelenggara sistem elektronik (PSE). Sesuai perundang-undangan dan peraturan menteri Kemkominfo, semua aplikasi utamanya yang terkait pengumpulan data di Indonesia harus terdaftar dalam PSE tersebut.

"Saat ini sedang diproses PSE-nya. Diharapkan dalam waktu dekat PSE-nya dapat terdaftar karena butuh beberapa regulasi," kata Setiaji, kemarin. Di antara regulasi yang masih harus diselesaikan itu adalah perubahan status pengembangan yang semula dikelola oleh Kemkominfo kini beralih ke Kementerian Kesehatan. Setiaji berharap regulasi ini bisa segera selesai.

Terkait rencana peleburan PeduliLindungi, Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharni me-

nilai, pemerintah perlu jaminan perlindungan data pribadi warga negara. Hal ini mengingat segala mekanisme di PeduliLindungi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data utama.

"Kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas

betul aturan mainnya agar data pribadi warga negara bisa terlindungi dengan baik dan tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti *pinjol* (pinjaman daring) ilegal dan sebagainya," kata dia, dalam keterangan, kemarin.

Puan juga menilai, penting pemerintah tidak menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya perangkat untuk mengakses ruang atau transportasi publik.

Ketua Satgas Satu Data Vaksinasi Covid-19, Telkom Indonesia Joddy Hernady mengatakan, saat ini pihaknya secara berkala terus melakukan evaluasi sistem keamanan PeduliLindungi dengan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).

"Kami sedang proses *update* PeduliLindungi. Sekarang sedang dipersiapkan, termasuk penambahan fitur. Karena ke depannya PeduliLindungi akan berdampingan di kehidupan sehari-hari," katanya memaparkan, dilansir Kemkes, kemarin.

■ ed:fitriyan.zamzami



**BERITA
TERKAIT**

**Dari Polres
Hingga Pasar**

Hlm- 7